

## Polantas Polres Bogor Lakukan Razia di Jalan Bumi Tegar Beriman

**BOGOR (IM)** - Jajaran Polantas Polres Bogor melakukan razia di jalan Tegar Beriman Pemda Kabupaten Bogor, tepatnya di depan Mapolres Bogor.

Dalam operasi tersebut yang diberhentikan oleh petugas diutamakan kendaraan bermotor roda dua, yang tidak menggunakan helm dan knalpot brong.

Dan pihak kepolisian telah melakukan penindakan tilang. Banyak pengendara yang diberikan sanksi tilang oleh polisi lantaran melintas di jalur cepat serta tidak memakai helm saat berkendara. Hal itu disampaikan Iptu Ardiana Nopianto Ashari, KBO Sat Lantas Polres Bogor.

Siapa saja yang menggunakan kendaraan yang tidak melengkapi syarat-syarat berkendara pasti kami lakukan penindakan tegasnya di sela-sela razia Selasa (5/12).

Lebih lanjut Ardiana menjelaskan, di depan Mapolres saja yang mengendarai kendaraan bermotor pada berani tidak menggunakan helm dan memakai knalpot brong, apalagi di tempat lain.

Makanya kami tertibkan dan kami melakukan penindakan agar ada efek jeranya.

Salah satu siswa yang terjaring razia sebut aja Fery, yang tidak lengkap surat kendaraannya dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terpaksa disuruh pulang naik gojek oleh petugas kepolisian dan disarankan sebelum memiliki SIM jangan dulu bawa kendaraan di jalan raya.

Hasil pantauan di lapangan puluhan kendaraan bermotor khususnya roda dua berhasil diamankan oleh polantas, karena tidak memakai helm dan memakai knalpot brong. ● jay/gio

## Iwan Setiawan Pasrah 'Wariskan' Predikat WDP ke Penjabat Bupati Bogor

**CIBINONG (IM)** - Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 'diwariskan' Bupati Bogor, Iwan Setiawan kepada Penjabat Bupati Bogor yang akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Iwan Setiawan mengaku trauma dan tidak mau memaksakan predikat WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), baginya lebih penting mendapatkan predikat kepuasan dari masyarakat.

"Saya trauma, predikat WTP (dari Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia tidak menjamin berarti masyarakat puas," kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Selasa (5/12).

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan bahwa masyarakat saat ini sudah mengerti bahwa predikat WTP itu hebat, sementara predikat WDP itu berarti kinerja pemerintah daerahnya tidak baik.

"Predikat WTP tidak menjamin bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal, buat apa mengejar dan mempertahankan predikat WTP kalau ada dampak negatif atau malah menjadi masalah karena berbagai cara dilakukan,"

tuturnya.

Iwan mengaku akan menyerahkan catatan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat ke Aparat Penegak Hukum (APH), hal itu karena setelah melewati waktu 60 hari pasca catatan itu diberikan, ada catatan yang belum bisa dibenahi.

"Kalau memang ada catatan belum bisa dibenahi maka akan diserahkan ke APH, cacatan pada tahun ini kebanyakan dari pihak ketiga atau rekanan jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (KPD) atau pihak lain dan bukannya Pemkab Bogor," jelas Iwan.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku bahwa catatan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat menjadi pelecut agar kedepan kita semakin baik dalam membangun Bumi Tegar Beriman.

"Catatan dan predikat WDP dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat di tahun ini atas pengelolaan anggaran di Tahun 2022 lalu jangan melemahkan semangat kita untuk sama-sama membangun Kabupaten Bogor secara lebih baik dari sebelumnya," tukas Rudy Susmanto. ● gio

## Pemkab Bogor Naikkan Insentif Ketua RT dan RW Jadi Rp600 Ribu

**CIBINONG (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menaikkan nilai insentif ketua RT dan RW dari Rp500 ribu per bulan menjadi Rp600 ribu per bulan berlaku mulai tahun 2024.

Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, menjelaskan Pemkab Bogor menyiapkan anggaran Rp25 miliar lebih pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk 20.445 ketua RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

"Jadi di 2024 saya usulkan naik dari Rp500 ribu menjadi Rp600 ribu per bulan. Alhamdulillah sudah diketok palu dan disetujui lewat Rapat Paripurna," katanya Senin (4/12).

Kenaikan insentif ketua RT dan RW ini mulai berlaku pada Januari 2024.

Menurut Iwan, kenaikan nilai insentif ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab kepada ketua RT dan RW yang merupakan ujung tombak pemerintah di lingkup terkecil.

Ia berharap para ketua RT dan RW semakin semangat dalam mengabdikan diri untuk masyarakat.

"Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk ketua RT dan RW, semoga makin semangat dalam bertugas, dalam melayani masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menambah

insentif RT/RW karena tugas mereka juga begitu

penting," kata Iwan.

Pihaknya juga memfasilitasi para ketua RT dan RW menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pemkab Bogor menganggarkan sekitar Rp2,6 miliar untuk membiayai 20.445 ketua RT dan RW se-Kabupaten Bogor selama 2024.

Program BPJS Ketenagakerjaan gratis ini dicetuskan Bupati Bogor tersebut mulai pertengahan 2023 dan mulai berjalan sejak Oktober 2023.

"Nah pada 2024 itu kami anggarakan selama setahun dan sudah disetujui saat Rapat Paripurna dengan DPRD minggu lalu," ungkap Iwan.

Program yang diikuti oleh ketua RT dan RW di Kabupaten Bogor ini terdiri dari dua jenis yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian).

Dengan program ini, Iwan berharap ketua RT/RW di Kabupaten Bogor mendapatkan perlindungan.

"Tujuan utama pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan pada ketua RT/RW. Harapannya, ada kenyamanan dan jaminan bagi ketua RT dan RW dalam melaksanakan tugas, Sehingga ketika ada yang meninggal dunia, nantinya akan mendapatkan jaminan santunan dari BPJS ketenagakerjaan," ujarnya. ● gio

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



### PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI DI BANDUNG

Pekerja mengoperasikan alat berat untuk menyelesaikan proyek pembangunan Kolam Retensi di Komplek Margahayu, Bandung, Jabar, Selasa (5/12). Pemerintah Kota Bandung membangun kolam retensi di Margahayu dengan daya tampung air sebanyak 2.339 meter kubik yang ditargetkan rampung pada akhir Desember guna mencegah banjir di wilayah tersebut.

## Sejumlah Kades Bermasalah Hukum, Rudy Susmanto Salahkan Inspektorat

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pun beranggapan Inspektorat Kabupaten Bogor tidak berhasil menjalankan tugasnya, hingga sejumlah Kades 'dipanggil' dan bahkan dijadikan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bogor maupun aparat penegak hukum lainnya seperti Polres Metro Depok.

**BOGOR (IM)** - Sejumlah kepala desa (Kades) diundang klarifikasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, terkait pengelolaan anggaran dana desa, bantuan keuangan infrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Sami Sade) maupun lainnya.

Apalagi, dari beberapa orang Kades tersebut, ada yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh kejari Kabupaten Bogor, dan bahkan dititip tahanan di Lapas Pondok Rajeg, Cibinong yaitu Kades Kranggan Gunung Putri periode 2017-2022 Adang dan

Kades Tonjong Tajurhalang, Nur Hakim.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pun beranggapan Inspektorat Kabupaten Bogor tidak berhasil menjalankan tugasnya, hingga sejumlah Kades 'dipanggil' dan bahkan dijadikan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bogor maupun aparat penegak hukum lainnya seperti Polres Metro Depok.

"Apabila masih banyak Kades yang berproses atau bermasalah dengan hukum, maka jangan hanya salahkan Kades tetapi juga Inspektorat," tegas Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa (5/12). Rudy Susmanto menuturkan bahwa Inspektorat bukan bertugas sebagai pemukul, teta-

pi berrugas sebagai pendamping secara administrasi dan hukup bagi para Kades.

"Kalau banyak Kades yang bermasalah dengan hukum, berarti Inspektoratnya tidur atau gagal. Harusnya mereka melakukan pendampingan kepada para Kades hingga mereka tidak bermasalah dan terjerat hukum, demi percepatan pembangunan di desa-desa," tuturnya.

Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra ini melanjutkan bahwa jumlah Kades yang bermasalah hukum semakin tahun, semakin banyak jumlahnya, hingga harus ada langkah kebijakan untuk mengantisipasinya.

"Saya meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDD) memaksimalkan pendampingan kepada para

Kades, karena tidak semua Kades memahami administrasi pemerintahan," lanjut Rudy Susmanto.

Dari informasi yang dihimpun, selain enam orang Kades diundang klarifikasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Kades Tonjong Nur Hakim dan Kades Kranggan Adang telah menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Bahkan, AJ sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kranggan ikut menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi, hingga ke tiga orang tersebut dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. ● gio

## Gunung Sindur Gandeng PWI dan Diskominfo Gelar Safari Journalistik



Pihak Kecamatan Gunung Sindur menggandeng PWI dan Diskominfo Kabupaten Bogor untuk menggelar Safari Journalistik.

**BOGOR (IM)** - Dalam upaya meningkatkan informasi dan komunikasi Kepala Desa (Kades), kepala sekolah, BPD di Kecamatan Gunung Sindur menggandeng Diskominfo, PWI Kabupaten Bogor menggelar Safari Journalistik di Aula Kantor Kecamatan Gunung Sindur, Selasa (5/12).

Dalam keterangannya, Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo mengatakan kegiatan safari jurnalistik ini merupakan kolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Bogor di bawah komando Bayu Rahmawanto selaku Kepala Dinas.

Ia memaparkan, giat kali ini bertemakan "Pemahaman, mengedepankan etika jurnalistik dan Undang-Undang pokok jurnalistik," kata Subagiyo.

Menurut dia, pasca reformasi saat ini telah terjadi euforia yang menyebabkan kebebasan pers. Sehingga, di era ini berbagai organisasi kewartawan banyak bermunculan.

Terlebih lagi, kata Subagiyo, banyak keluhan dari para pemangku kebijakan, mulai dari Kepala Desa (Kades)/Lurah, Kepala Sekolah, Camat se-Kabupaten Bogor, hingga para pimpinan di SKPD di lingkup Pemkab Bogor, yang disambangi pihak-pihak tak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan profesi wartawan.

"Maka itu, banyak yang perlu diberi pemahaman, karena desa adalah bagian yang kita sebut sebagai pahlawan Desa serta pahlawan sesuai dengan aspek di bidangnya," tambahya.

Subagiyo juga menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada para pihak yang telah menerima baik giat Safari Journalistik yang digagas PWI Kabupaten bersama Diskominfo setempat.

"Saya merasa bangga di Kecamatan Gunung Sindur, karena Forkopimcamnya terlihat kompak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara intansinya itu dengan wadah organisasi keprofesian kewartawan yang mengelhat giat semacam tersebut.

Pasalnya, kata Bayu, momentum itu sangat baik bagi para aparatur pemer-

intahan di lingkup Pemkab Bogor dalam memberikan pemahaman dan edukasi terkait yang terjadi di wilayah.

"Di giat ini, banyak yang menyampaikan rasa terima kasih kepada kami dan PWI Kabupaten Bogor khususnya, karena telah memberi wadah kepada para kades dan camat khususnya di Kecamatan Gunung Sindur untuk mencurahkan rasa keinginan tahunya saat menghadapi rekan-rekan wartawan yang dirasa sangat berbeda dengan yang ada di PWI Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Lebih jauh ia memaparkan, dalam hal itu pun Diskominfo Kabupaten Bogor merasa sangat senang atas kolaborasi yang terjalin dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Bumi Tegar Beriman, dalam mengelhat safari jurnalistik.

"Diskominfo Kabupaten Bogor sangat senang, dan merasa puas atas giat Safari Journalistik yang digelar untuk ketiga kalinya. Yang pertama di kecamatan Citeureup, Bojonggede, dan kecamatan Gunung Sindur yang terakhir pada hari ini. Insha Allah akan kita lakukan terus acara yang positif seperti ini untuk di tahun 2024 yang akan datang," pungkasnya. ● gio

### PERCEPAT PENURUNAN STUNTING

## Pemkab Bogor Bagikan Nutrisi bagi Bayi Penerima Bantuan

**BOGOR (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui DP3AP2KB Kabupaten Bogor dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor memberikan bantuan nutrisi tambahan sebanyak 1.000 dus bagi 250 bayi penerima bantuan sebagai upaya untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Aula Rapat Bappedalitbang Kabupaten Bogor, bertepatan dengan kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting II Tingkat Kabupaten Bogor, pada Senin (4/12).

Sebagaimana diketahui bahwa, bantuan 1.000 dus diberikan kepada 250 bayi penerima bantuan usia 1-2 tahun hasil bulan penimbangan bayi yang dilakukan di 13 desa yang tersebar di lima kecamatan.

Perlu diketahui, berdasarkan e-PPGBM Tahun 2022, jumlah balita stunting di Kabupaten Bogor mengalami penurunan cukup signifikan dari sebesar 4,78% kini pada tahun 2023 turun menjadi 1,59%.

Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Lina Yuliana mengungkapkan, upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan melalui prevensi stunting, intervensi

lintas sektor baik spesifik dan sensitif pada hasil penimbangan balita, pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS).

Surveilans keluarga berisiko stunting akan dilengkapi dengan Kegiatan Audit Kasus Stunting (AKS) guna mengidentifikasi permasalahan dan rencana tindak lanjut di tingkat kabupaten. Serta audit kasus stunting periode I dan II.

"Melalui kegiatan ini diharapkan jadi moment kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan peran keluarga dalam memberikan akselerasi pencapaian cakupan sasaran terutama penduduk yang mempunyai kemandirian bermasyarakat serta memiliki budaya perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya mewujudkan Bogor New Zero Stunting Tahun 2024," imbuhnya.

Selanjutnya, Subkor Advokasi dan KIE, Maman Supardi menerangkan, audit stunting telah dilakukan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, ibu menyusui dan baduta untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor. ● gio



Percepat penurunan stunting, Pemkab Bogor membagikan bantuan nutrisi tambahan buat bayi.